

## **ANALISIS FLYPAPER EFFECT, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN KHUSUS PADA BELANJA MODAL**

**Made Fajar Paramartha<sup>1</sup>**  
**I Gusti Ayu Nyoman Budiasih<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
*e-mail:* [fajar\\_paramartha@yahoo.co.id](mailto:fajar_paramartha@yahoo.co.id) / telp: +6281 146 502 777

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terjadi fenomena *Flypaper Effect*, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Khusus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Populasi penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Bali, teknik penentuan sampel penelitian ini adalah sampling jenuh karena seluruh populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel penelitian. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda dengan program SPSS versi 19.0 menunjukkan (a) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal, (b) Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal, (c) Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, (d) Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal.

**Kata Kunci:** *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Flypaper Effect dan Belanja Modal*

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine whether there is the phenomenon of flypaper, Local Revenue (PAD), and Special Allocation Fund (DAK) in Regency / City in the province of Bali. The study population was all regencies / cities in Bali, sampling technique sampling of this study is saturated because the entire population in this study the research sample. The analytical tool used in this research is multiple linear analysis with SPSS version 19.0 indicates (a) Revenue (PAD) affects capital expenditures, (b) Funds Aloksi (DAU) has no effect on capital expenditures, (c) Funds Special Allocation (DAK) significant effect on capital expenditures, (d) Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) jointly affect the Capital Expenditure*

**Keywords:** *PAD, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, flypaper and Capital Expenditure.*

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya dan suku bangsa. Wilayah negara Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah mempunyai potensi alam dan kebudayaan yang berbeda yang apabila dikelola dengan maksimal akan mampu meningkatkan pembangunan di daerah masing-masing, dengan sistem pemerintahan sentralistik yang pernah dianut Indonesia sebelum masa reformasi, mengakibatkan segala potensi yang ada di setiap daerah tidak mampu dikelola secara maksimal. Untuk meningkatkan pengelolaan potensi daerah, semenjak tahun 1999 pemerintah mengambil kebijakan memberikan kewenangan terhadap daerah untuk mengelola potensi yang ada di daerahnya yang dikenal dengan istilah Otonomi Daerah. Otonomi Daerah diatur secara spesifik dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diperbaharui dengan undang-undang no 33 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya dengan tidak bertentangan dengan kebijakan dan Dasar Negara Indonesia.

Otonomi Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menjalankan kepentingan masyarakat daerah otonom (Suparmoko, 2002). Otonomi Daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan bermasyarakat, kesejahteraan sosial, pemerataan, dan pemeliharaan kinerja yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah dan antar daerah (Maimunah, 2006).

Diterapkannya otonomi daerah, selain memberikan hak dan kewenangan daerah dalam mengelola potensi daerahnya juga dituntut untuk mandiri dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah memiliki lima fungsi yaitu (1) penyedia pelayanan, dimana dalam melaksanakan fungsi ini pemerintah daerah merupakan organisasi yang berorientasi untuk menyediakan pelayanan yang berfokus pada pengendalian lingkungan dan kemasyarakatan; (2) fungsi pengaturan, dimana dalam hal ini pemerintah daerah berfungsi sebagai fokus penegak peraturan sekaligus merumuskannya; (3) fungsi pembangunan, dimana pemerintah daerah dalam hal ini akan terlibat dalam segala bentuk kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan aspek lainnya; (4) fungsi perwakilan merupakan fungsi dari pemerintah daerah untuk menyatakan pendapat daerah atas dasar hal-hal diluar bidang tanggung jawab eksekutif yang dilakukan oleh legislative dan (5) fungsi koordinasi dan perencanaan merupakan fungsi pemerintah daerah berkaitan dengan pengelolaan potensi daerah dan tata guna tanah. (Davey, 1998).

Dalam melaksanakan fungsinya, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola keuangan daerahnya dengan baik. Terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, maka berdasarkan PP 105 tahun 2000, pemerintah daerah dapat mengatur pengelolaan keuangan daerahnya dengan harapan terjadinya keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah.

Desentralisasi fiskal yang diberlakukan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan reaksi yang berbeda bagi setiap daerah. Daerah yang memiliki potensi kekayaan alam yang baik tentu menyambut baik kebijakan ini. Namun daerah yang miskin sumber daya alam serta infrastruktur yang kurang memadai menanggapi kebijakan ini dengan rasa khawatir dan pesimis. Namun, terlepas dari berbagai tanggapan tersebut, dengan diberlakukannya kebijakan ini, maka daerah dituntut untuk mempersiapkan segala aspek baik Sumber daya manusia serta infrastruktur lainnya. Salah satu hal pokok yang harus dipertimbangkan daerah adalah pengelolaan keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah yang baik menyangkut kemampuan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah dan mengelompokkannya kedalam pengeluaran-pengeluaran dengan efektif, efisien dan ekonomis.

Aspek utama manajemen keuangan daerah menyangkut pengelolaan dana perimbangan dan manajemen Pendapatan Asli daerah. Dalam UU No. 32 tahun 2004 dijelaskan bahwa untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, Daerah Otonom mendapat bantuan dana dari pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Selain mendapat transfer dana dari Pemerintah pusat, Daerah Otonom mendapatkan sumber dana dari potensi daerah sendiri yang disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

pajak daerah, redistribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Dengan sumber-sumber pendapatan tersebut daerah otonom diharapkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi daerah agar mampu memberikan kontribusi yang maksimal untuk membangun daerahnya sendiri. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menggunakan dan tersebut dengan catatan harus efisien dan efektif untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan dana tersebut harus bersifat transparan dan akuntabel.

Setiap daerah memiliki potensi alam yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan setiap daerah memiliki pendapat asli daerah yang berbeda-beda. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan memiliki industri yang maju akan memiliki PAD yang lebih besar dibandingkan daerah yang lebih sedikit memiliki sumber daya alam maupun industri yang sedikit. Daerah dengan pendapatan asli daerah yang rendah tentu masih mengharapkan adanya transfer dana yang lebih besar dari pemerintah pusat. Permasalahan yang muncul adalah ketika pemerintah daerah terlalu bertumpu pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja modal dan pembangunan tanpa berusaha memanfaatkan potensi daerah yang mereka miliki yang selanjutnya dikenal dengan istilah *Flypaper effect*.

*Flypaper effect* merupakan kecenderungan menggunakan dana dari pemerintah pusat dibandingkan menggunakan dana dari pendapatan daerah yang dimiliki atau yang dikenal dengan PAD. Fenomena *Flypaper Effect* membawa implikasi bahwa akan meningkatkan belanja pemerintah daerah dibandingkan dengan transfer dana

dari pemerintah pusat. Maimunah (2008) menemukan bahwa semakin besar Dana Alokasi Umum (DAU) dan Penadapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Maimunah (2008) juga mengatakan bahwa fenomena *Flypaper Effect* berpengaruh dalam memprediksi belanja daerah tahun kedepannya. Penelitian lain yang merespon terjadinya pengaruh *Flypaper Effect* dalam merespon Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah.

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah berkaitan dengan pengadaan aset tetap seperti tanah, gedung, peralatan dan kendaraan. Belanja ini berkaitan dengan upaya pemerintah untuk menyediakan fasilitas untuk menunjang kinerja pemerintah dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya. Belanja modal merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mengimbangi ketimpangan PAD pada pemerintah kabupaten di Bali maka pemerintah pusat memberikan transfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diharapkan mampu dipergunakan untuk membantu meningkatkan belanja modal. Untuk mengetahui bagaimana dimanfaatkannya dana perimbangan ini untuk pembiayaan belanja modal maka saya melakukan penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah Fenomena *Flypaper Effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali; (2) Bagaimanakah pengaruh

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengalokasian belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali; (3) Bagaimanakah pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pengalokasian belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali; (4) Bagaimanakah pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pengalokasian Belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan (5) Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pengalokasian belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Tujuan penelitian adalah : (1) Untuk mengetahui fenomena flypaper effect pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2009-2013; (2) Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengalokasian belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2009 – 2013; (3) Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pengalokasian belanja modal pada kabupaten/kota di bali tahun 2009-2013; (4) Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pengalokasian belanja modal pada Kabupaten/Kota di bali tahun 2009-2013 dan (5) Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pengalokasian belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2009-2013.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi pengetahuan teoritis dari pembaca mengenai topik yang saya angkat yaitu pengaruh *flypaper effect*, pertumbuhan

ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap pengalokasian belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan sejumlah informasi kepada pemerintah Provinsi Bali tentang bagaimana pengaruh *Flypaper Effect*, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap pengalokasian belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Sehingga dapat membantu masing-masing pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan pada saat penyusunan anggaran.

Desentralisasi Fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi.

Pengelolaan merupakan istilah yang digunakan dalam ilmu manajemen yang merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Pengelolaan pada dasarnya tidak hanya merujuk pada pelaksanaan suatu kegiatan melainkan menyangkut pula aspek perencanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam pelaksanaan otonomi daerah, anggaran daerah merupakan alat dalam mengelola keuangan daerah.

Menurut Mardiasmo (2002) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Keuangan daerah adalah hak dan kewajiban dalam rangka



penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sementara anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besaran pendapatan dan pengeluaran, membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.

Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disamping dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat, daerah juga dapat membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah. PAD merupakan barometer utama suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Diharapkan dengan adanya otonomi, kemandirian daerah dapat diwujudkan yang dimanifestasikan lewat struktur PAD yang kuat.

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi dana alokasi umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan

memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2009).

Menurut Widjaja(2007), Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan khusus daerah. Dana alokasi khusus merupakan dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sementara pada pasal 1 angka 23 UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan antara keuangan pusat dan keuangan daerah dijelaskan bahwa “dana alokasi khusus selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang ditujukan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mandanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.”

Istilah Flypaper Effect diperkenalkan pertama kali oleh Courant, Gramlich dan Rubinfeld (1979) untuk mengartikulasikan pemikiran Arthur Okun (1930) yang menyatakan “*money stick where it hits*. Sejauh ini belum ada padanan kata flaypaper effect dalam bahasa Indonesia sehingga kata ini dituliskan sebagaimana tanpa adanya diterjemahkan. Fenomena *Flypaper Effect* membawa implikasi lebih luas bahwa

transfer dari pemerintah pusat akan meningkatkan belanja pemerintahan daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri (Siagian,2009).

Pengaruh transfer pada kinerja fiskal pemerintah daerah dapat dijelaskan dari teori perilaku konsumen. Hastuti (2011) mempelopori analisis transfer ke dalam format kendala anggaran dan kurva indiferensiasi. Transfer bersyarat (*conditional grants*) berpengaruh pada konsumsi barang privat melalui efek harga. Bantuan bersyarat, misalnya transfer penyeimbang tidak terbatas (*open-ended matching grants*), akan menurunkan harga barang publik. Dalam konteks ini, pemerintah memberikan subsidi untuk setiap unit barang publik. Pengaruh transfer bersyarat pada konsumsi barang privat tergantung pada sensitivitas silangnya. Jika, harga barang publik yang lebih rendah akan meningkatkan konsumsi barang privat apabila pemerintah daerah telah menurunkan tarif pajak. Dengan adanya hal tersebut, maka kenaikan transfer sebagian berakibat pada kenaikan konsumsi barang publik dan sebagian lagi pada konsumsi barang privat secara tidak langsung melalui penurunan tarif pajak (Adiputra, 2014).

Belanja Modal merupakan unsur dari pengeluaran daerah yang digunakan untuk membiayai pengadaan asset tetap. Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Otonomi daerah selain memberikan peluang kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri juga menuntut daerah untuk mampu memenuhi segala tuntutan dan aspirasi masyarakat daerahnya. Untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya, pemerintah daerah memerlukan infrastruktur yang memadai. Pembelanjaan ini berupa pembelanjaan asset tetap yang dikategorikan sebagai belanja modal. Untuk itu, daerah dituntut untuk memaksimalkan pemanfaatan segala potensi yang dimiliki. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu penerimaan pemerintah daerah yang memiliki kontribusi cukup besar dalam pembangunan di daerah. Beberapa penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran daerah sudah dilakukan. Penelitian Hryo kuncoro (2007), Siagian (2009) dan Adiputra (2014) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Dalam beberapa penelitian, hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan daerah mempengaruhi anggaran belanja

pemerintah daerah disebut dengan tax- spend hypothesis (Saputri 2011). Hipotesis ini mengandung makna bahwa kebijakan Pemerintah Daerah dalam menganggarkan belanja daerah disesuaikan dengan pendapatan daerah yang diterima. Berdasarkan uraian teori tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanjamodal

Selain bersumber dari pendapatan asli daerah, sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan maka dibentuk dana perimbangan. Salah satu bentuk dana perimbangan tersebut adalah dana alokasi umum. Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. (Ardhani 2011).

Beberapa penelitian memberikan bukti empiris bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah. Penelitian Harianto dan Adi (2007) memperoleh hasil bahwa DAU berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian Ardhani (2011) memberikan bukti empiris bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan indikasi bahwa belanja

daerah (belanja modal) sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU. Sehingga peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Dana Alokasi Umum Berpengaruh Positif terhadap belanja Modal.

Dana Alokasi Khusus merupakan dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Tidak semua daerah di Indonesia memperoleh dana alokasi khusus. Dana ini diprioritaskan untuk daerah-daerah tertentu yang memenuhi kriteria untuk memperoleh tambahan dana perimbangan dari pemerintah pusat berupa dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus dialokasikan dengan tujuan untuk mempercepat perkembangan daerah tertentu serta mencapai tujuan kegiatan atau program tertentu sesuai skala nasional. Penelitian yang dilakukan oleh Nahlia (2014) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini dikarenakan pemberian DAK diprioritaskan untuk mencapai tujuan dari program/kegiatan tertentu bagi daerah yang menerima dana alokasi khusus. Berdasarkan hal itu, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Positif terhadap belanja Modal.

Pada dasarnya, ada dua sumber penerimaan daerah yaitu pendapatan asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DAU, DAK dan perimbangan penerimaan PBB). Setiap daerah memiliki jumlah penerimaan yang berbeda serta memiliki perbedaan dalam prioritas pembangunannya. Untuk mendukung program pembangunan serta kinerja daerah, maka daerah dituntut untuk menyediakan fasilitas serta

infrastruktur yang memadai. Pengeluaran untuk fasilitas tersebut biasa berkaitan dengan belanja modal seperti pengadaan lahan (tanah), gedung, peralatan serta kendaraan. Belanja ini tentunya akan disesuaikan dengan besarnya penerimaan dari daerah yang bersangkutan. Hasil penelitian Siagian (2009) menyatakan bahwa secara simultan PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal ini didukung oleh penelitian Nahlia (2014) yang menyatakan bahwa PAD, DAU dan DAK secara simultan berpengaruh pada belanja pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana alokasi Khusus secara simultan Berpengaruh Positif terhadap belanja Modal.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini adalah kuantitatif yang menggunakan 3 (tiga) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel terikat (dependent) yaitu belanja modal dan variabel bebas (independent) yaitu PAD, DAU dan DAK dimana terlebih dahulu diuji terjadi atau tidaknya flypaper effect pada kabupaten/kota di Bali. Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 9 (sembilan) Kabupaten dan Kota di Bali. Sampel yang diambil berdasarkan teknik sampling jenuh, dimana seluruh populasi menjadi sampel penelitian.

Teknik Analisis Data yang digunakan pada penelitian ini adalah model regresi berganda. Teknik ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel pertumbuhan ekonomi (PDB), pendapatan asli daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (BM).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang dikumpulkan dengan metode pengumpulan data peroleh deskripsi data tentang variabel penelitian seperti pada tabel berikut :

**Tabel 1.**  
**Data Deskriptif Variabel Penelitian**

No	Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviation
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	45	12.252.951.000	899.241.565.000	210.045.535.466,67	211.009.681.796,287
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	45	106.361.821.000	696.419.224.000	363.904.873.711,11	142.472.104.924,219
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	45	5.589.200.000	136.388.000.000	33.842.405.688,89	26.997.097.392,092
4	Belanja Modal	45	42.555.098.000	527.705.700.000	132.852.577.177,78	98.224.373.994,871

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel 1 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2009-2013, tertinggi sebesar Rp. 899.241.565.000 dan terendah sebesar Rp. 12.252.951.000 dengan rata-rata Rp. 210.045.535.466,67 serta



standar deviasi sebesar Rp. 211.009.681.796,287. Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2009-2013, tertinggi sebesar Rp696.419.224.000 dan terendah Rp. 106.361.821.000 dengan rata-rata Rp. 363.904.873.711,11 serta standar deviasi sebesar Rp. 142.472.104.924,219. Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2009-2013, tertinggi sebesar Rp. 136.388.000.000 dan terendah sebesar Rp. 5.589.200.000 dengan rata-rata Rp. 33.842.405.688,89 serta standar deviasi sebesar Rp.26.997.097.392,092. Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2009-2013, tertinggi Rp. 527.705.700.000 dan terendah Rp. 42.555.098.000 dengan rata-rata Rp. 132.852.577.177,78 serta standar deviasi sebesar Rp. 98.224.373.994,871.

**Tabel 2.**  
**Uji Normalitas**

No	Variabel	N	<i>Asymp.sig</i>	<i>Alpha</i>	Keterangan
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	45	0,099	0,05	Normal
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	45	0,903	0,05	Normal
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	45	0,103	0,05	Normal
4	Belanja Modal	45	0,068	0,05	Normal

Sumber: Data diolah,2015

Pada Tabel 2 tersebut menyatakan bahwa koefisien *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari tingkat signifikansi. sedangkan tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa data yang digunakan adalah berdistribusi normal karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05

**Tabel 3.**  
**Uji Multikolinearitas**

No	Variabel	Nilai <i>Tolerance</i>	Nilai <i>VIF</i>
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,990	1,010
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	0,973	1,028
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,977	1,024

Sumber: Data diolah, 2015

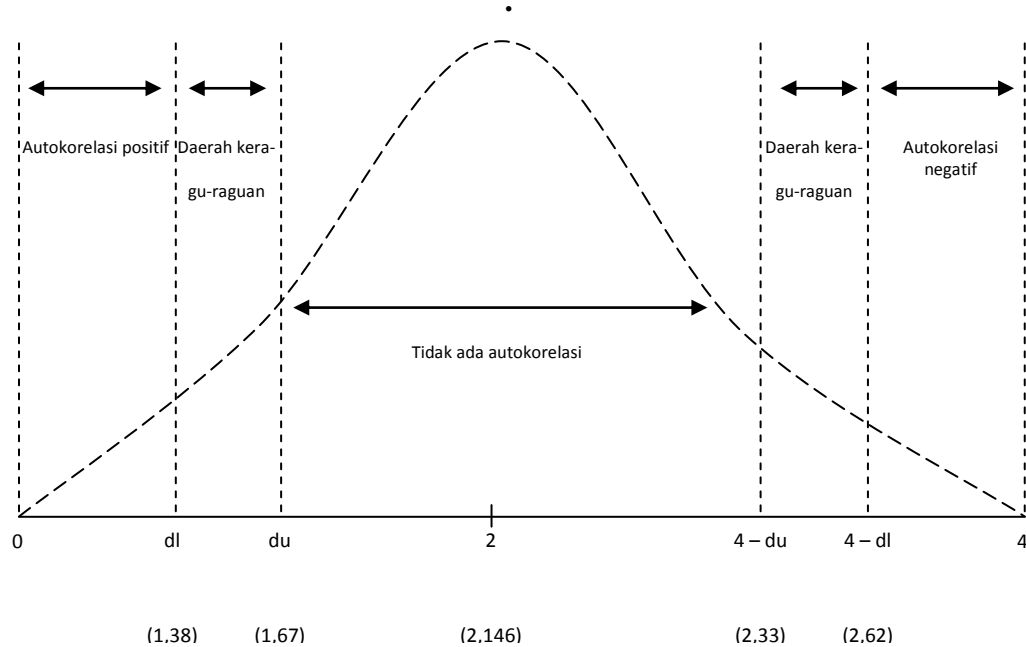
Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada Tabel 3 diketahui bahwa nilai *Tolerance* variabel-variabel bebas berada di atas 0,1 dan nilai *VIF* berada di bawah 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinieritas

**Tabel 4.**  
**Uji Heterokedastisitas**

No	Variabel	Sig.	Keterangan
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,353	Bebas heteroskedastisitas
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	0,100	Bebas heteroskedastisitas
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,211	Bebas heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2015

Hasil *output* SPSS pada Tabel 4 tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel sebesar 0,353, 0,100 dan 0,211. Nilai signifikansi masing-masing variabel tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heterokedastisitas



**Gambar 1. Kurva Uji Autokorelasi**

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan Gambar 1 diketahui bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2,146 berada di daerah bebas autokorelasi, dengan demikian model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami masalah autokorelasi.

Berdasarkan Tabel 5 di atas, terlihat bahwa besarnya nilai *R square* adalah sebesar 0,606. Ini berarti pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2009-2013 sebesar 60,6%, sedangkan sisanya 39,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak masuk dalam model penelitian.

**Tabel 5.**  
**Uji Regresi Linier Berganda**

Variabel	Koefisien Regresi	t-test	Sig-t
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,241	5,257	0,000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-0,016	-0,230	0,819
Dana Alokasi Khusus (DAK)	2,021	5,603	0,000
Konstanta	19536713043,94		
R	0,779		
R square (R <sup>2</sup> )	0,606		
F <sub>hitung</sub>	21,032		
Sig. F	0,000		

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat nilai koefisien regresi dari variabel-variabel bebas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan konstanta variabel terikat (Belanja Modal). Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = 19536713043,94 + 0,321X_1 - 0,016X_2 + 2,021X_3 + e \dots \dots \dots (1)$$

Berdasarkan persamaan tersebut, maka variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Persamaan tersebut juga berarti sebagai berikut: (1) Konstanta sebesar 19536713043,94 mengandung arti jika variabel-variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi

Khusus (DAK) tidak berubah, maka Belanja Modal tidak mengalami perubahan atau sama dengan 19536713043,94.; (2)  $\beta_1 = 0,321$ ; berarti apabila variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, maka mengakibatkan peningkatan pada Belanja Modal, dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap konstan; (3)  $\beta_2 = -0,016$ ; berarti apabila variabel Dana Alokasi Umum (DAU) menurun, maka mengakibatkan penurunan pada Belanja Modal, dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap konstan dan (4)  $\beta_3 = 2,021$ ; berarti apabila variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) meningkat, maka mengakibatkan peningkatan pada Belanja Modal, dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap konstan.

**Tabel 6.**  
**Uji Hipotesis**

No.	Variabel	Signifikansi
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,000
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	0,819
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,000

Sumber: Data diolah, 2015

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan terdapat pengaruh secara parsial dan secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal. Pembahasan untuk masing-masing uji hipotesis akan dijabarkan sebagai berikut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2009-2013, ini dilihat dari sig t lebih kecil dari 0,05 atau  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti terdapat

pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. ini berarti Pendapatan Asli Daerah masih sangat sangat diandalkan dalam pembiayaan belanja modal, sehingga jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah akan semakin besar dan kemandirian daerah akan semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto & Yustikasari (2007) maupun Putro (2011) yang menghasilkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2009-2013, ini dapat dilihat dari sig t lebih besar dari 0,05 atau  $0,819 > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima. Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum (DAU) ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU dimanfaatkan oleh daerah dalam APBD untuk membiayai belanja gaji yang merupakan bagian dari belanja langsung, maka dari itu dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Arbie (2014) yang berjudul pengaruh PAD, DAK, DAU dan DBH terhadap pengalokasian belanja Modal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2009-2013, ini dapat dilihat dari Oleh karena sig t lebih kecil dari 0,05 atau  $0,000 < 0,05$ , maka

$H_0$  ditolak. Hal ini berarti terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal. DAK dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk : (1) mendanai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah atas dasar prioritas nasional, dan (2) mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. Seluruh kegiatan khusus dari pemerintah pusat ini terdapat dalam bagian dari belanja modal yaitu seperti perbaikan jalan, gedung pemerintahan dll. Hal ini sejalan dengan penelitian Holtz-Eakin (1995), yang menjelaskan terjadi keterkaitan antara transfer pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, ini dilihat dari sig F lebih kecil 0,05 atau  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak. Dengan demikian, terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama terhadap Belanja Modal. Jika PAD, DAU dan DAK meningkat maka alokasi belanja modal daerah akan meningkat pula dan berpengaruh terhadap pelayanan publik yang semakin meningkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Jika PAD, DAU dan DAK meningkat maka alokasi belanja modal daerah akan meningkat pula dan berpengaruh terhadap pelayanan publik yang semakin meningkat.

Hasil penelitian menunjukkan Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh paling besar terhadap Belanja Modal ini dapat dilihat dari nilai standard koefisien beta sebesar 0,556, maka terjadi fenomena *flypaper effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2009-2013. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Rokhaniyah dan Nugroho (2011), dimana terjadi fenomena *flypaper effect* pada daerah di Jawa. terjadinya fenomena *flypaper effect* di Bali dikarenakan kabupaten/kota di Bali masih sangat mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengeluaran Belanja Modal (Kuncoro 2005).

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka simpulan yang diperoleh sebagai berikut: (1) Terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2009-2013; (2) Tidak terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2009-2013; (3) Terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2009-2013; (4) Terdapat pengaruh secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2009-2013 dan (5) Terjadi Fenomena *Flypaper Effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2009-2013.



Saran yang diajukan untuk Pemerintah daerah dan penelitian selanjutnya adalah:  
(1) Diharapkan kepada pemerintah masing-masing Kabupaten/kota di Bali supaya meningkatkan potensi daerahnya agar tidak terlalu tergantung kepada transfer dari pemerintah pusat; (2) Kepada peneliti selanjutnya adalah dengan menambah daerah sampel penelitian dan rentang waktu penelitian sehingga hasil penelitian lebih dapat digenerilasi dan (3) Kepada peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel-variabel belanja daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti belanja pendidikan, kesehatan dan transportasi.

## REFERENSI

- Adiputra, I M.P. 2014. "*Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Karangasem*".Jurnal Ilmiah dan Humanika Volume 3 Nomor 2. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Afriza, 2012."*Analisis Flypaper effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatra Utara*.Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi. Universitas Sumatra Utara
- Afrizawati. 2012. Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius)*.Vol. 2 No. 1 Januari 2012. Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
- Ardhani, P. 2011. "*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah)*".Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.
- Baicker, Katherine. 2001.Government Decision-Making and the Incidence of Mandates."Journalof Public Economics. 82(2): 147-194.

- Bradford, David and Wallace Oates. "The Analysis of Revenue Sharing in a New Approach to Collective Fiscal Decisions." *Quarterly Journal of Economics*. 85(3): 416-439, 1971a.
- Brodjonegoro, Bambang, and Shinji Asanuma. 2000. "Regional Autonomy and Fiscal Decentralization in Democratic Indonesia", *Hitotsubashi Journal of Economics*, Vol. 41 no.2, Tokyo, The Hitotsubashi Academy.
- Bugin, B. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Edisi Pertama, Jakarta: Kencana.
- Courant, P.N., Gramlich, E.M., & Rubinfeld, D.L. 1979. "The Stimulative Effects of Intergovernmental Grants: Or Why Money Sticks Where It Hits". Washington DC: Urban Institute.
- Darwanto & Yustikasari, Y. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmiah*. Makasar: Simposium Nasional Akuntansi X.
- Fisher, Ronald C. 1892. "Income and Grant Effects on Local Expenditure: The Flypaper Effect and Other Difficulties." *Journal of Urban Economics*, 12: 324-345.
- Filimon, Radu, Thomas Romer and Howard Rosenthal. 1982. "Asymmetric Information and Agenda Control." *Journal of Public Economics*, 17: 51-70,
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS17*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Gordon, Nora. 2004. "Do Federal Grants Boost School Spending? Evidence from Title I." *Journal of Public Economics*. 88(9-10): 1771-92.
- Hamilton, Bruce W. 1983. "The Flypaper Effect and Other Anomalies." *Journal of Public Economics*, 22: 347-362.
- Hamilton, Jonathan. 1986. "The Flypaper Effect and the Deadweight Loss from Taxation." *Journal of Urban Economics*, 19: 148-155.
- Halim, A. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah. Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hastuti, I. 2011. "Analisis Flypaper Effect Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota Semarang". Skripsi Universitas Diponegoro.

- Hines, James R. and Richard H. Thaler.1995. "Anomalies: The Flypaper Effect." *Journal of Economic Perspectives*, 9(4): 217-226.
- Holtz-Eakin, Douglas, Harvey S, & Schuyley Tilly. 1994. *Intertempora Analysis of State An Local Government Spending: Theory and Tests*. *Journal of Urban Economics* 35: 159-174
- Indrianto, N., & Supomo, B. 2002.*Metodologi Penelitian Bisnis*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Ketetapan MPR No.IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- Kiryana, I K. 2010 "*Ekonomi Makro (Suatu Pengantar)*" Singaraja. Universitas Pendidikan Ganesha
- Kreps, D. and R. Wilson. 1982. "Reputation and Imperfect Information." *Journal of Economic Theory*, 27: 253-279.
- Kuncoro, H. 2004. "*Pengaruh Transfer Antar Pemerintah pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan kabupaten di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol 9.
- Milgrom, P. and J. Roberts.1982."Predation, Reputation and Entry Deterrence." *Journal of Economic Theory*, 27: 280-312.
- Mofitt, Robert. 1984. "The Effects of Grants-in-Aid on State and Local Expenditures: The Case of AFDC." *Journal of Public Economics*, 23: 279-305.
- Nahliana, F. 2014 "*Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Kepulauan RIAU periode 2007-2012." Skripsi Universitas Maritim Raja Ali
- Nugroho.2011. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Rosjidi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah (Kerangka, Standar dan Metode)*, Jakarta: Salemba Empat.

- Santoso, S. 2011. *Mastering SPSS Versi 19*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Saputri, M.A. 2014 “*Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Tahun 2011-2012*. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Setiawan, A. 2010. “*Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.
- Siagian, P.A. 2009. *Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara*. *Jurnal Usu Repository*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Suwardjono. 2011. *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan Edisi Tiga*. Yogyakarta. BPFY Yogyakarta
- Tandjung, A.H. 2012. “*Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual, Pendekatan Teknis Sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010*.” Bandung: Alfabeta.
- Turnbull, Geoffrey K. 1992. "Fiscal Illusion, Uncertainty and the Flypaper Effect." *Journal of Public Economics*, 48: 207-222.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Wijaya, H.A.W. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wong, John D. 2004. *The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity*. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. Fall. 16.3. 799-816.